

APAKAH PENINGKATAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERAN UMKM DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN ?

Tiara Fitri Rizkiyah¹, Sulaeman Rahman Nidar²

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia

²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Tiarafitririzkiyah17@gmail.com¹, Sulaeman.rahman@fe.unpad²

Abstract

Poverty is a complex issue that is difficult to solve in almost every region in Indonesia especially in West Java Province. The poverty rate can be influenced by several factors such as credit BPR and UMKM role. The reason of this study is to analyze how a great deal of growth in credit provision made by means of BPR and what sort of growth within the role of MSME in reducing poverty degrees in West Java. The data used in this study is secondary with a population of 22 districts/cities in West Java for the 2010-2018 period. The analysis approach used on this study is panel information linear regression analysis with the assist of Eviews 8.0 with the fixed effect version that's used as an analysis technique on this study. The results showed that poverty in West Java Province was explained by BPR, and UMKM role at 83,8% (R^2). The effects confirmed that (1) an growth in BPR credit had a significant impact on the real stage of five% with a chance price of zero.0006 and became undoubtedly associated with the acquired coefficient fee of 0.032. (2) The growth in MSME publicity has a full-size effect on the five% real stage with a opportunity cost of 0.0000 and is definitely associated with the received coefficient price of zero.316. moreover, simultaneously that BPR credit score and the role of MSME have an effect on the poverty charge in West Java Province by using 38.36%.

Keywords: poverty; credit extension; UMKM

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang masih sulit terpecahkan hampir di setiap daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemberian Kredit oleh BPR dan Peran UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar peningkatan kredit BPR dan seberapa besar peningkatan peran UMKM berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Data yang digunakan pada penelitian adalah sekunder dengan populasi 22 kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2010-2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier panel data dengan bantuan Eviews 8.0 dengan Fixed Effect digunakan sebagai teknik analisis pada penelitian ini. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mampu dijelaskan oleh Kredit BPR dan Peran UMKM sebesar 83,8% (R^2). Selanjutnya secara parsial koefisien regresi menunjukkan (1) Peningkatan Kredit BPR berpengaruh signifikan dengan taraf nyata 5% menggunakan nilai probabilitas 0,0006 serta berafiliasi positif menggunakan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.032. (2) Peran UMKM berpengaruh signifikan dengan taraf nyata 5% menggunakan nilai probabilitas 0,0000 serta berafiliasi positif menggunakan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.316. lalu kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berpengaruh signifikan oleh Kredit BPR dan peran UMKM secara simultan sebesar 38,36%.

Kata kunci : kemiskinan; pemberian kredit; UMKM

Corresponding author : Tiarafitririzkiyah17@gmail.com

History of article: Received: Juni 2021, Revised: Desember 2021, Published: April 2022

PENDAHULUAN

Kemiskinan dalam Millenium Development Goals (MDGs) menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara dunia (Nkammnebe & Idemobi, 2011). Selama ini, pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat hingga daerah sudah gencar meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif ketika di satu sisi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan. Seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak bisa dikendalikan, dan lainnya. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan tingkat kemiskinan mengacu kepada garis kemiskinan (GK) yakni Rp386.198 per kapita perbulannya. Angka GK tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen dibanding September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, data BPS menunjukkan pada periode September 2018 - Maret 2019 jumlah penduduk miskin Jawa Barat, di daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebanyak 67,57 ribu jiwa dan 72,67 ribu jiwa. Namun dengan angka 3,39 juta jiwa, menurut Dody jumlah penduduk miskin tersebut masih termasuk banyak dibandingkan daerah lain (Roberto & Wijaya, 2010).

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu (Rachman, 2016).

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Provinsi Jawa Barat (JABAR) karena tingginya proporsi penduduk miskin dan rendahnya tingkat perkembangan ekonomi, dibandingkan rata-rata di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, di antaranya melalui penyediaan layanan keuangan mikro. Pelayanan keuangan mikro merupakan strategi penting yang diyakini dapat membantu membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Di Indonesia, beberapa pelayanan keuangan mikro dinilai telah berhasil membantu mengurangi kemiskinan, di antaranya adalah pelayanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit desa (Charitonenko & Afwan, 2003). Dalam banyak kasus usaha kecil memiliki orientasi yang bisa berbeda dibanding usaha besar. Menurut Rizkiyah (2020) bahkan menengarai bahwa kebanyakan usaha kecil lebih merupakan *social business* yang tujuannya bukan memaksimalkan profit, tetapi lebih mengutamakan pada mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, memberikan pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, dan beberapa tujuan lain yang sifatnya lebih sosial. Selain memberikan andil cukup besar bagi perekonomian nasional, BPR memiliki kedudukan penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan cakupan kegiatan BPR yang difokuskan pada usaha mikro dan kecil banyak melibatkan masyarakat miskin maupun masyarakat yang kehidupannya dekat dengan kemiskinan (Adi, 2007).

Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan pertumbuhan UKM meningkat pesat dua tahun terakhir ini. Selanjutnya UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus kita akui bahwa UMKM mempunyai suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Peran yang sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian (Lianti et al., 2013).

Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Peranan penting UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki (Maryati, 2014).

Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya didalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuannya lebih baik dan dimamis dalam

menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan, dekat dengan kemiskinan (Prasetyo, 2008).

Selanjutnya, pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Krisna, 2016).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar peningkatan kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat, seberapa besar peningkatan peran UMKM berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat, dan seberapa besar peningkatan kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta peningkatan peran UMKM berpengaruh secara (simultan) terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Oleh karena itu diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Peningkatan kredit BPR, dan Peningkatan Peran UMKM dapat terus meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective* (Putriana,2014).

Mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan ditinjau berasal sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul sebab adanya ketidaksamaan di kepemilikan sumberdaya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yg tak seimbang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumberdaya pada jumlah terbatas serta kualitasnya rendah. kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya insan. Kualitas sumberdaya insan rendah berarti produktivitasnya rendah, yg pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya insan ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya subordinat atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan ada akibat perbedaan akses dalam modal (Nidar,2016).

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu (Rachman,Siswanti,2016).

Keuangan mikro (*microfinance*) merupakan alat yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja,meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonominya. Salah satu pendekatan yang dipergunakan dalam aplikasi konsep keuangan mikro adalah diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen kredit yang biasanya disertai dengan layanan tambahan, seperti pelatihan baca tulis, menghitung, penyuluhan kesehatan dan gizi, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ini, pemerintah dan atau pihak donor membiayai kredit untuk orang miskin, dengan bunga di bawah suku bunga pasar. Sasarannya adalah orang miskin, untuk membantu keluar dari jerat kemiskinan serta memberdayakan mereka (Marguerite s., Robhinson, 1992).

Kegiatan keuangan mikro dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro (*microfinance institution*) yang selama ini telah relatif dikenal oleh masyarakat,seperti Bank Perkreditan masyarakat, Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal wat Tamwil, forum Swadaya rakyat, dan berbagai gerombolan arisan. Selain itu, BRI Unit Desa sebagian akbar pembiayaannya pula dapat digolongkan pada kredit mikro.

Dalam banyak kasus usaha kecil memiliki orientasi yang bisa berbeda dibanding usaha besar. Bahkan menengarai bahwa kebanyakan usaha kecil lebih merupakan *social business* yang tujuannya bukan memaksimumkan profit, tetapi lebih mengutamakan pada mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, memberikan pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, dan beberapa tujuan lain yang sifatnya lebih sosial (Salam, 2007). Selain memberikan andil cukup besar bagi perekonomian nasional, BPR memiliki kedudukan penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan cakupan

kegiatan BPR yang difokuskan pada usaha mikro dan kecil banyak melibatkan masyarakat miskin maupun masyarakat yang kehidupannya dekat dengan kemiskinan (Tambunan, 2012). Memandang BPR merupakan LKM yang berpotensi besar mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberian kredit mikro (Yunus, 2011).

Pengembangan ekonomi rakyat harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM ini memegang peranan yang sentral dan strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Sektor UMKM akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bisa diharapkan menjadi *backbone* dalam bangkitnya sektor riil. Menurut laporan dari BPS ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha dalam melakukan usaha. Sebagian besar pengusaha mikro mempunyai latar belakang ekonomi yaitu ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Faktor keturunan juga menjadi latar belakang pengusaha mikro yaitu meneruskan usaha keluarga yang terdahulu dan alasan lain adalah tidak adanya kesempatan berkarier di bidang lain (Badan Pusat Statistik.2007).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Badan Pusat

Statistik.2010).

Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya didalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuannya lebih baik dan dimamis dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan, dekat dengan kemiskinan (Prasetyo, 2008).

Selanjutnya, pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Krisna, 2016).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2011) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Desain penelitian

deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan peningkatan kredit BPR, peningkatan peran UMKM dan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian verifikatif menurut Arikunto (2006) adalah penelitian yang pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan. Pada penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh peningkatan kredit BPR dan peningkatan peran UMKM terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2018.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010) mengatakan bahwa populasi merupakan “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini 22 kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Sugiyono (2010), yang dimaksud dengan sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah data kemiskinan, data kredit BPR, data perkembangan UMKM periode 2010-2018 yang telah dipublikasikan oleh BPS dan OJK.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber. Pada konteks penelitian ini pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, melalui orang lain atau melalui dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan tehnik *non participant observasi* atau yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Pada praktiknya pengumpulan

data sekunder yang diperoleh dari *website internet* BPS yang terkait dengan masalah kemiskinan, perkembangan UMKM dan Bank Indonesia, OJK dengan masalah Pemberian Kredit BPR. selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Analisis Data

Uji signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel, uji signifikan yang digunakan adalah uji determinasi (R^2), uji F dan uji t. Uji determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghazali, 2009).

Menurut Ghazali (2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel Kredit BPR dan peran UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$). Uji F ditunjukkan untuk mengukur hubungan keseluruhan antara koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis adalah:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n = 0$, berarti variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n \neq 0$, berarti variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

Untuk menguji hipotesis secara simultan digunakan statistik F (F_{test}).

Rumus yang digunakan untuk statistik F adalah:

$$F = \frac{\text{Mean Square Regression}}{\text{Mean Square Error}}$$

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Kredit BPR

Dalam banyak kasus usaha kecil memiliki orientasi yang bisa berbeda dibanding usaha besar. Bahkan menengarai bahwa kebanyakan usaha kecil lebih merupakan social Business yang tujuannya bukan memaksimalkan profit, tetapi lebih mengutamakan pada mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, memberikan pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, dan beberapa tujuan lainnya yang bersifat lebih sosial (Yunus, 2011). Kredit merupakan penyediaan dana yang di dalamnya terdapat kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar setelah jatuh tempo dengan pemberian bunga atau bagi hasil. Hasil desk study berkaitan dengan perkembangan pembiayaan/kredit BPR konvensional menunjukkan bahwa nilai

kredit BPR di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2018 mengalami peningkatan dengan rentang paling rendah sebesar 29.83 pada tahun 2010 di kabupaten Ciamis dan rentang paling tinggi sebesar 1.823.891 pada tahun 2018 di kota Bandung (Tabel 1).

Tabel 1. Nilai kredit BPR di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018

No	Kabupaten/Kota	Perkembangan Kredit/Pembiayaan BPR Konvensional								
		Berdasarkan Jenis Penggunaan di Provinsi Jawa Barat per Hari II (Jutaan Rupiah)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bagor	217.17	238.964	299.017	333.316	338.71	642.241	723.474	882.012	89.115
2	Sukabumi	367.774	431.294	497.414	551.947	561.969	410.335	411.299	502.321	522.889
3	Cianjur	180.405	91.329	99.357	120.192	122.654	358.891	328.621	410.203	434.761
4	Bandung	403.813	403.958	434.919	462.339	457.816	905.743	737.908	871.143	891.562
5	Ciurut	88.178	115.395	180.536	217.14	219.914	475.91	433.992	443.921	448.631
6	Tasikmalaya	228.102	214.688	159.969	182.915	186.55	401.296	459.402	602.721	689.562
7	Ciamis	29.83	35.413	46.922	53.209	52.919	113.941	141.651	151.991	158.009
8	Kuningan	45.685	51.842	64.659	76.182	74.159	134.908	153.224	171.324	177.789
9	Cirebon	228.153	262.239	288.304	315.314	315.936	587.346	586.563	613.012	631.602
10	Maniklangu	98.828	128.661	141.494	172.715	174.328	307.338	375.703	426.732	455.401
11	Sumendang	90.658	110.538	102.495	116.951	114.558	238.901	254.122	265.431	291.003
12	Indramayu	196.937	222.891	260.646	288.712	285.58	484.671	525.741	568.909	611.23
13	Subang	311.55	358.148	488.733	589.673	585.833	681.025	758.842	828.15	875.643
14	Purwakarta	46.238	50.78	49.746	53.015	51.723	215.194	187.027	200.997	261.756
15	Karawang	58.309	80.986	99.674	107.654	108.975	209.337	236.203	252.745	334.981
16	Belkasi	282.446	351.959	448.63	501.12	514.968	730.166	826.48	904.652	920.226
17	Bandung Barat	55.378	84.564	92.121	120.447	126.096	153.254	125.681	146.828	162.521
18	Pangandaran									
19	Kota Bogor	160.511	133.108	170.154	170.692	175.943	320.885	330.861	392.621	302.872
20	Kota Sukabumi	31.104	36.684	36.259	36.331	36.326	187.425	137.707	120.556	138.65
21	Kota Bandung	1.947.474	2.442.042	2.521.705	2.804.501	2.935.615	1.799.995	1.593.974	1.789.342	1.823.891
22	Kota Cirebon	225.301	292.049	264.731	259.279	261.734	293.427	301.156	341.024	352.628

Analisis Deskriptif Peran UMKM

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah diakui merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata bagi masyarakat. Pengetasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu lebih dari 99.45% tenaga kerja meskipun demikian kontribusi terhadap PDB maupun PDRB masih sekitar 30%. Berbagai program dan strategi pemerintah untuk mengembangkan UMKM di daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di provinsi Jawa Barat sangat banyak antara lain program kredit mikro, pembinaan lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya, dan yang baru-baru ini adalah program bantuan langsung tunai khusus pelaku UMKM. Upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini semata-mata untuk memajukan sektor UMKM, yang dampaknya akan dapat meningkatkan

kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga akan menertibkan dampak yang signifikan bagi upaya pengetasan kemiskinan di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Barat.

Berikut adalah Tabel 2, perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018. Dari Tabel 2 menunjukkan perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2018 mengalami peningkatan dengan rentang paling rendah sebesar 2.026 pada tahun 2010 di kota Banjar dan rentang paling tinggi sebesar 220.325 pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor.

Tabel 2. Perkembangan UMKM Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018

Data UMKM menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Barat (Kapita/bulan),2010-2018										
No	Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bogor	92.931	104.476	120.328	135.882	151.285	168.109	184.171	200.897	220.325
2	Sukabumi	28.601	31.349	33.945	38.471	42.506	46.938	51.132	55.981	61.477
3	Cianjur	19.696	21.758	23.782	26.513	28.925	32.349	35.386	38.554	42.912
4	Bandung	48.431	53.849	60.045	67.856	76.373	85.619	94.334	102.865	113.185
5	Garut	25.465	28.108	30.364	33.687	37.084	40.665	44.452	48.004	53.009
6	Tasikmalaya	15.853	17.558	19.031	21.272	23.238	25.666	27.996	30.532	33.963
7	Ciamis	13.716	15.275	16.772	18.674	20.395	22.588	24.524	26.544	29.132
8	Kuningan	9.819	10.867	11.951	13.459	14.998	16.986	18.563	20.447	22.753
9	Cirebon	21.496	23.823	26.297	29.411	32.579	35.734	38.841	41.919	45.461
10	Majalengka	12.883	14.135	15.691	17.543	19.193	21.292	23.207	25.405	28.047
11	Sumedang	14.686	16.392	18.141	20.261	22.345	24.832	27.007	29.638	32.539
12	Indramayu	47.859	54.157	59.376	63.312	67.625	72.377	76.533	80.814	85.588
13	Subang	19.817	22.364	23.052	24.732	26.815	29.307	31.531	34.259	37.499
14	Purwakarta	28.016	31.209	35.592	40.609	45.496	50.116	54.575	58.529	63.057
15	Karawang	99.641	113.18	124.276	141.631	156.318	167.116	182.984	197.883	217.404
16	Bekasi	154.347	172.406	188.175	206.069	227.591	246.003	261.91	281.757	305.343
17	Bandung Barat	19.322	21.337	24.144	27.382	30.681	33.991	37.043	40.204	43.807
18	Pangandaran	4.978	5.466	5.984	6.686	7.276	8.016	8.683	9.401	10.365
19	Kota Bogor	18.775	20.766	23.254	26.082	29.147	32.364	35.401	38.478	42.216
20	Kota Sukabumi	5.321	5.923	6.511	7.309	8.141	8.971	9.718	10.549	11.471
21	Kota Bandung	102.154	115.203	131.989	151.794	172.697	195.774	216.863	240.109	264.551
22	Kota Cirebon	10.093	11.178	12.284	13.611	15.037	16.703	18.139	19.791	21.599
23	Kota Bekasi	41.283	46.139	51.699	57.715	64.109	70.765	76.908	83.327	90.982
24	Kota Depok	26.601	29.594	33.283	38.627	43.806	48.532	53.331	58.344	64.292
25	Kota Cimahi	13.571	14.931	16.501	18.385	20.568	22.646	24.563	26.591	28.992
26	Kota Tasikmalaya	9.291	10.116	11.081	12.293	13.623	15.237	16.751	18.317	20.094
27	Kota Banjar	2.026	2.253	2.466	2.759	3.011	3.329	3.606	3.909	4.241
RATA-RATA										

Analisis Deskriptif Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat (World Bank, 2010). Perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Barat terus meningkat. Kenaikan yang terjadi selama kurun waktu 2010 sampai 2018 disebabkan antara lain lemahnya kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh kelesuan

perekonomian global. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Salah satu penyebabnya bisa dimungkinkan karena akses dan infrastruktur yang kurang memadai di daerah perdesaan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan. Tabel 3. menggambarkan peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018.

Hasil Tabel 3 menunjukkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2018 mengalami peningkatan secara fluktuatif dengan rata-rata dari tahun 2010 sebesar 201.138 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 324.992 dan seterusnya sampai pada tahun 2018. Peningkatan secara fluktuatif terjadi di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Barat (Kapita/bulan),2010-2016										
No	Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bogor	214.338	235.682	252.542	271.971	280.312	290.874	317.431	337.551	359.787
2	Sukabumi	184.127	214.191	227.741	240.188	247.801	260.068	270.055	284.603	302.213
3	Cianjur	202.438	235.202	250.032	264.581	273.506	287.939	304.255	320.391	340.882
4	Bandung	217.452	228.092	241.947	256.733	264.129	275.562	297.483	310.569	334.929
5	Garut	180.406	202.351	213.707	226.308	234.661	241.068	256.771	267.252	282.683
6	Tasikmalaya	186.126	209.238	222.594	237.114	246.796	255.541	274.471	284.462	306.759
7	Ciamis	208.961	233.528	251.624	270.515	283.227	296.647	319.151	334.038	357.382
8	Kuningan	200.171	230.251	245.476	261.858	271.015	276.154	289.901	302.061	332.483
9	Cirebon	230.346	262.374	281.027	300.991	312.194	327.032	333.758	346.241	370.747
10	Majalengka	263.377	300.741	326.962	353.727	368.901	379.354	393.071	409.559	440.776
11	Sumedang	230.637	239.009	249.315	260.161	265.495	281.649	295.009	307.394	334.743
12	Indramayu	264.576	301.788	325.787	350.455	364.361	379.088	397.196	413.857	447.378
13	Subang	234.803	243.311	257.543	272.854	280.501	295.174	303.583	316.317	331.557
14	Purwakarta	226.118	236.314	251.132	271.271	281.524	296.477	312.499	325.607	352.061
15	Karawang	266.597	288.001	310.751	335.273	344.477	363.105	386.282	408.579	433.972
16	Bekasi	271.901	300.013	328.244	361.511	374.255	394.513	416.058	434.112	463.507
17	Bandung Barat	216.388	227.988	241.892	256.789	264.244	275.327	294.823	309.304	329.415
18	Pangandaran	-	-	-	-	-	303.646	327.399	342.672	360.96
19	Kota Bogor	278.531	305.871	331.955	360.518	372.886	392.405	416.779	450.078	480.749
20	Kota Sukabumi	284.339	334.735	370.633	411.523	395.131	421.908	441.948	470.133	497.995
21	Kota Bandung	279.784	292.104	314.721	340.355	353.423	376.311	400.541	420.579	448.902
22	Kota Cirebon	251.375	284.543	307.812	334.439	349.599	358.654	373.866	392.725	426.738
23	Kota Bekasi	332.849	365.721	403.033	449.026	466.851	497.343	521.813	544.534	582.723
24	Kota Depok	310.279	358.259	397.687	443.302	462.069	496.747	522.934	556.471	615.255
25	Kota Cimahi	280.155	293.143	318.871	347.234	361.794	386.513	411.665	433.759	462.969
26	Kota Tasikmalaya	263.177	293.985	317.037	337.841	351.718	367.673	397.215	416.837	447.008
27	Kota Banjar	193.305	219.541	234.687	250.311	260.742	271.017	289.369	305.603	324.958
RATA-RATA		201.138	226.097	242.104	276.825	291.474	306.876	324.992		

Uji Hipotesis Simultan

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-

variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F atau pengujian secara simultan. Dengan kata lain, akankah kedua variabel bebas secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat dengan signifikan. Hasil uji F berdasarkan pengolahan *Eviews 8.0* disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

F-Statistic	38.36
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber : data primer, diolah (2021)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai Prob. F hitung sebesar 0,000. Oleh karena nilai Prob. F hitung ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak. Uji F menunjukkan nilai sebesar 38.36 dimana nilai ini lebih besar dari $> F_{tabel}$ 3. 04 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kredit BPR (X_1), peran UMKM (X_2) terhadap Kemiskinan (Y).

Uji Hipotesis Parsial

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data yang terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Hasil	t-Statistic	Prob	Sign
Kredit BPR	(+) 0.032	3.490	0.0006	Sig
UMKM	(+) 0.316	13.706	0.0000	Sig

Sumber : data primer, diolah (2021)

Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa secara parsial, kredit BPR (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan (Y). Hal ini dapat di lihat dari nilai *t-statistic* 3.490 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1.97 dengan arah hubungan yang positif. Hal

ini sejalan dengan nilai probabilitas yang berada dibawah nilai error yang dapat ditoleransi yaitu 5% ($0.0000 < 0.05$) tingkat kepercayaan 95%, artinya berpengaruh signifikan tetapi semakin tinggi kredit yang diberikan oleh BPR tidak menurunkan tingkat kemiskinan

Selain itu untuk UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t-statistic* 13.706, nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1.97 dengan arah hubungan yang positif. Hal ini sejalan dengan nilai probabilitas yang berada diatas nilai error yang dapat ditoleransi yaitu 5% ($0.1016 > 0.05$) tingkat kepercayaan 95%, artinya berpengaruh signifikan tetapi semakin tinggi peran UMKM di suatu daerah tidak menurunkan tingkat kemiskinan.

Koesisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kredit BPR dan peran UMKM secara bersama-sama terhadap kemiskinan, digunakan koefisien determinasi. Jika uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan, maka koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besaran pengaruh dari kedua variabel bebasnya, yaitu variabel Kredit BPR dan Peran UMKM. Besaran pengaruh ini berkisar dari interval 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Tabel 6 di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan koefisien determinasi dari 20 data panel yang digunakan.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

R-squared	0.838821
Adjusted R-squared	0.816953

Sumber : data primer, diolah (2021)

Berdasarkan hasil output *Eviews 8.0* di atas, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.838. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kredit BPR (X_1) dan peran UMKM (X_2) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar 83,8% sisanya sebesar 16,2% merupakan kontribusi variabel lain selain variabel bebas yang diteliti.

Pengaruh Peningkatan Kredit BPR terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Dari hasil analisis regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel kredit BPR menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Untuk variabel kredit BPR (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 3.49. Karena t hitung (3.49) $>$ t tabel (1.97), maka H_0 diolak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Kredit yang diberikan oleh BPR tidak menyentuh kepada masyarakat yang marginal (*poor people*). sehingga banyaknya penyaluran kredit yang terdaftar tetapi masih belum tepat sasaran. Dilihat dari peruntukannya, kredit yang di salurkan untuk masyarakat menengah kebawah dan mikro digunakan dengan tujuan yang tidak produktif atau lebih bersifat konsumtif, tentunya hal tersebut akan menambah beban pengeluaran dan menurunkan pendapatan. Dengan adanya ketidak tepatan tersebut peran BPR harus sangat hati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Banyak pendekatan yang dilakukan oleh BPR dalam rangka mengetaskan kemiskinan tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan yang dimiliki, sehingga sasaran yang dicapai tepat sasaran. Pendekatan bagi kelompok masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) harus lebih di ketatkan dan lebih di perhatikan dengan pendekatan langsung berupa program pangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Sedangkan kelompok yang miskin dengan penghasilan rendah menggunakan pendekatan tidak langsung seperti penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan UKM, terbentuknya lembaga pelatihan dan konsultasi BPR, pengembangan berbagai jenis pinjaman yang dapat mempermudah akses kelompok tersebut, sehingga upaya yang dilakukan oleh BPR akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Dapat disimpulkan bahwa Kredit BPR (X_1) secara parsial memiliki pengaruh

signifikan terhadap kemiskinan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit BPR memiliki koefisien positif yang berarti semakin tinggi pemberian kredit oleh BPR, tetapi tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Peningkatan Peran UMKM terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel peran UMKM signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Untuk variabel peran UMKM (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 13.70. Oleh karena t_{hitung} (13.70) $<$ t_{tabel} (1.97), maka H_0 diterima, dan menunjukkan tanda positif. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Pelaku usaha baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha kecil dan menengah belum semuanya paham dan belum secara menyeluruh terdaftar di lembaga Kementerian Koperasi dan UMK atau Dinas Koperasi dan UMK di kabupaten dan kota. Pelaku usaha pada prakteknya lebih berperan aktif dalam menopang dan menggerakkan roda perekonomian. Pada era digitalisasi sekarang pelaku usaha lebih tertarik dan lebih nyaman melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan digital atau *e-commers*, karena di rasa penggunaan platform *e-commers* sangat mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk beban-beban produksi lainnya. Sehingga pelaku usaha pada akhirnya terlena dengan izin usaha ataupun tidak mendaftarkan usahanya pada lembaga baik di Kementerian koperasi dan UMK pusat maupun di dinas koperasi dan UMK yang pada akhirnya kurangnya data UMKM yang ada di BPS.

Padahal peran UMKM dan pengembangan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja. Berbagai program dan strategi pemerintah untuk mengembangkan UMKM di daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di provinsi Jawa

Barat sangat banyak antara lain program kredit mikro, pembinaan lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya, dan yang baru-baru ini adalah program bantuan langsung tunai khusus pelaku UMKM. Upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini semata-mata untuk memajukan sektor UMKM, yang dampaknya akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga akan menertibkan dampak yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Barat.

Dapat disimpulkan bahwa peran UMKM (X_2) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UMKM memiliki koefisien positif yang berarti semakin tinggi atau meningkatnya peran UMKM, tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Kredit BPR dan Peran UMKM terhadap Kemiskinan

Secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara kredit BPR dan peran UMKM terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *F-statistic* bernilai 0,000. Karena nilai prob *F-statistic* $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama kredit BPR dan peran UMKM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi tidak sesuai dan tidak sejalan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini. Dengan adanya keterbatasan data yang digunakan baik secara data yang terdaftar, olah data ataupun pengambilan data di lapangan. Sehingga hasil yang di dapat tidak sesuai dengan landasan teori penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan, Kredit yang diberikan oleh BPR tidak menyentuh kepada masyarakat yang marginal (*poor people*). sehingga banyaknya penyaluran kredit yang terdaftar tetapi masih belum tepat sasaran. Dilihat dari peruntukannya, kredit yang di salurkan untuk masyarakat menengah kebawah dan mikro digunakan dengan tujuan yang tidak produktif atau lebih bersifat konsumtif, tentunya hal tersebut akan menambah beban pengeluaran dan menurunkan pendapatan. Dengan adanya ketidak tepatan tersebut peran BPR harus sangat hati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

Pelaku usaha baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha kecil dan menengah belum semuanya paham dan belum secara menyeluruh terdaftar di lembaga Kementerian Koperasi dan UMK atau Dinas Koperasi dan UMK di kabupaten dan kota. Pelaku usaha pada prakteknya lebih berperan aktif dalam menopang dan menggerakkan roda perekonomian. Pada era digitalisasi sekarang pelaku usaha lebih tertarik dan lebih nyaman melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan digital atau *e-commers*, karena di rasa penggunaan platform *e-commers* sangat mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk beban-beban produksi lainnya. Sehingga pelaku usaha pada akhirnya terlena dengan izin usaha ataupun tidak mendaftarkan usahanya pada lembaga baik di Kementerian koperasi dan UMK pusat maupun di dinas koperasi dan UMK yang pada akhirnya kurangnya data UMKM yang ada di BPS.

Secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara kredit BPR dan peran UMKM terhadap kemiskinan. Tetapi tidak sesuai dan tidak sejalan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini. Dengan adanya keterbatasan data yang digunakan baik secara data yang terdaftar, olah data ataupun pengambilan data di lapangan. Sehingga hasil yang di dapat tidak sesuai dengan

landasan teori dan penelitian terdahulu pada penelitian ini.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel-variabel yang sekiranya berpengaruh terhadap kemiskinan diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih terfokus pada wilayah yang cakupannya lebih kecil agar lebih dapat terfokus secara khusus di suatu wilayah yang ada di Indonesia terutama daerah-daerah tertinggal. Kepada lembaga penyedia Data baik BPS dan OJK maupun BI lebih mengupdate data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. K. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Charitonenko, S., & Afwan, I. (2003). *Commercialization Of Microfinance Indonesia Asian Development Bank*. Indonesia: Asian Development Bank.
- Ghazali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Program Edisi Ketiga*. Semarang: Bp UNDIP.
- Janiar, L. V., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Ilmu Ekonomi*, 1, 352–364.
- Krisna. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2), 137–154. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.235>
- Lianti, Hamzah, A., & Nasir, M. (2013). Pengaruh Kredit Perbankan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 1(4), 31–41.
- Marguerite s, R. (1992). *Rural Financial Intermediation : Lessins from Indonesia, Part One The Bank Rakyat Indonesia : Rural Banking, 1970-1991. Development Discussion paper No.434*. Harvard Institute for International Development, Harvard University
- Maryati,S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education*, 3(1).
- Nidar, S. R. (2016). *Manajemen Keuangan Modern*. Bandung: Pusaka Reka Cipta
- Nkammnebe, A. D., & Idemobi, E. I. (2011). Recovering of Micro Credit in Nigeria: Implications for Enterprise Development and Poverty Alleviation. *Emerald Group Publishing Limited*, 34(2), 236–247.
- Prasetyo. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2.
- Putriana, P. (2012). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Kutubkhanah*, 15(2), 117-128.
- Rachman, S. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 71–82. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2567>
- Rachman, S. (2017). analisis pengaruh perkembangan usaha kecil dan menengah sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 71-82.
- Rizkiyah, T. F., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Gema Wiralodra, 11(2), 311-326.
- Rizkiyah, T.F. (2019). Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat (Kabupaten/ Kota) <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/0/rows/50/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/qu>

- ery/tiara+fitri+rizkiyah/docId/174531
- Roberto, A., & Wijaya, K. (2010). *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Salam, A. (2007). *Sustainabilitas koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat*. text.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. In *Director*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Grafindo Persada.
- Tambunan, T. T. (2012). Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 73-92.
- Yunus, M. (2011). *Micro Credit Summit*.